

BAB III

KRISIS DIPLOMATIK QATAR

Pada bab ini penulis akan membahas tentang krisis diplomatik Qatar beserta dampak-dampak yang akan dirasakan oleh Qatar serta implikasi dampak krisis Qatar terhadap Indonesia.

A. Kronologi Terjadinya Krisis Diplomatik Qatar

Pada Tanggal 5 Juni 2017, Arab Saudi, UEA, Yaman, Mesir, Maladewa, dan Bahrain secara terpisah mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Hal ini dikarenakan Qatar dituduh telah memberikan dana ataupun membiayai teroris. Warga Arab dan sejumlah negara Teluk dikejutkan dengan adanya berita di sebuah situs Al Arabiya dan laporan berita di Sky News Arabic. Berita tersebut mengabarkan bahwa Emir pemimpin negara Qatar memuji Iran sebagai kekuatan regional yang penting. (Debora, 2017)Tindakan ini bagi Arab Saudi merupakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Qatar, karena sebelumnya di tahun 2014 Qatar telah berjanji untuk menyesuaikan kebijakannya dengan Arab Saudi. Bagi Arab Saudi kebijakan regional Iran merupakan sebuah ancaman bagi negaranya. Sama halnya menurut Hukamnas ada beberapa penyebab Negara-negara Teluk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar yaitu salah satunya karena negara Qatar mendukung Iran, Qatar dituding mendukung ekstremisme dan Terorisme. Negara Qatar yang telah mendukung Iran sudah bukanrahasia umum lagi jika Arab Saudi dan Iran merupakan musuh bebuyutan yang sangat mustahil kelak menjadi negara tetangga yang akur dan bersahabat. Negara Iran tetap dekat dengan Qatar meskipun berbeda aliran, dimana Qatar yang merupakan suni dan Iran yang merupakan Syiah. Ini menunjukkan bahwa pokok permasalahan antara Iran dan Arab Saudi bukanlah masalah Suni-Syiah. Qatar yang dituding oleh Arab Saudi mendukung agenda-agenda Iran.(Roll, 2017, hal. 1-2)

Selain itu, dalam berita tersebut juga dijelaskan bahwa Qatar mendukung organisasi ekstremis seperti Ikhwanul Muslimin. Qatar yang menjadikan negaranya sebagai tempat

untuk menampung kelompok tersebut justru bagi Arab Saudi, Ikhwanul muslimin merupakan organisasi teroris dan kelompok yang dapat mengganggu stabilitas keamanan politik di kawasan Timur Tengah. Pandangan Arab Saudi tersebut disebabkan peristiwa Arab Spring yang terjadi beberapa tahun silam yang menuding jika terjadinya perubahan rezim dan jatuhnya presiden Mesir, Husni Mubarak di tahun 2011 akibat adanya peranan penting dari eksploitasi perubahan yang dilakukan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin. Berbeda dengan Qatar yang menanggapi peristiwa tersebut merupakan bentuk dari demokrasi yang dilakukan oleh rakyat Mesir.

Dalam sebuah buku Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah yang ditulis oleh Dr. Sidik Jatmika, Ikhwanul Muslimin sendiri merupakan sebuah organisasi Islam yang berdiri di Mesir pada bulan Maret 1928 yang didirikan oleh Hassan al-Banna. Organisasi ini memiliki pandangan jika Islam adalah agama yang umum dan menyeluruh, bukan agama yang sekedar mengajarkan ibadah ritual (salat, puasa, haji, zakat, dll.) saja. Selain itu, ajaran Shufi yang melekat memberikan peranan pada organisasi ini, sehingga menolak adanya penjajahan dan monarki yang pro terhadap barat. Kemudian dalam perpolitikan yang terjadi di beberapa negara, organisasi Ikhwanul muslimin mengikuti jalannya demokrasi sebagai bentuk dari hasil pemikirannya. Namun, meskipun demikian Ikhwanul Muslimin tetap mengikuti perkembangan teknologi sebagai bentuk organisasi Islam moderat agar dapat diterima oleh segala lapisan dan pergerakan. Ikhwanul Muslimin juga sebuah organisasi Islam yang menegaskan bahwa Islam harus mengikuti sesuai perkembangan zaman. (Jatmika, 2014)

Tak hanya mendukung kelompok ikhwanul muslimin, berita tersebut juga mengabarkan jika Qatar mendukung Hamas yang menurut Arab Saudi Hamas merupakan ancaman bagi negara-negara Teluk. Bagi Arab Saudi dan sejumlah negara-negara Teluk, Hamas yang dulunya merupakan bagian dari Ikhwanul Muslimin kini telah memisahkan diri dianggap mengancam keamanan Arab Saudi dan wilayah Teluk dikarenakan Hamas adalah sebuah organisasi yang dipandang

sebagai teroris. Berita tersebut juga mengabarkan jika Qatar mendukung Hizbullah. Dimana Hizbullah merupakan sebuah organisasi teroris yang ditetapkan oleh Liga Arab saat menggelar pertemuan di Mesir. Pertemuan tersebut dilakukan atas rencana Arab Saudi. Penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris didasarkan atas pandangan Arab Saudi dan sejumlah anggota negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab terkait dengan serangan rudal balistik yang terjadi pada 4 November 2017 di Bandara Internasional Riyadh yang dilakukan oleh Hizbullah dan Iran. (Harb, 2017, hal. 15-20)

Namun Qatar membantah keras tudingan tudingan tersebut, Qatar menyatakan bahwa negaranya anti-terorisme. Dan usahanya melawan terorisme lebih kuat dari negara-negara tetangganya. Pemerintah Qatar beranggapan bahwa tudingan yang diberitakan oleh media tersebut tidak berdasar, Qatar juga berargumen jika Qatar News Agency (QNA) telah di retas. Berita yang berisi sejumlah tudingan terhadap negara Qatar tersebut terus berjalan, terutama di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Pada waktu yang bersamaan juga sebuah akun media sosial menteri luar negeri Qatar turut di retas, dan pelaku tersebut justru kemudian menyebarkan berita bahwa Qatar telah memutuskan hubungan dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab beserta Mesir. Namun dalam kasus ini tidak ada satu pun media yang memberitakan bahwa Qatar telah memberikan klarifikasi jika Qatar tidak melakukan tindakan tersebut. (Al Jazeera Centre for Studies, 2017) Namun, Terlepas dari beredarnya pemberitaan terkait dengan dukungan Qatar terhadap kelompok ekstremis dan Iran, pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017 disebabkan oleh dukungan Qatar kepada Iran mengenai pengayaan uranium di Iran. Perbuatan tersebut dikecam oleh negara-negara Arab karena merupakan bentuk ambisi Iran terhadap program nuklirnya yang dapat membahayakan keamanan di kawasan Arab. Kedekatan Qatar terhadap Iran ini justru membangkitkan emosi bagi Arab Saudi, sehingga menimbulkan krisis diplomatik pada Arab Saudi kepada Qatar. Pernyataan ini disampaikan oleh ketua Penelitian dan Publikasi dari Pusat

Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Machmudi. (Suastha, 2017) Untuk itu, walaupun pemerintah Qatar menolak dengan keras tudingan tersebut, Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya tetap memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar.

B. Dampak Pemutusan Hubungan Diplomatik Bagi Qatar

Adanya pemutusan hubungan diplomatik Qatar ini, seluruh negara teluk yang terlibat memerintahkan warganya keluar dari Qatar. Tiga negara Teluk (Arab Saudi, UEA, Bahrain) memberi waktu dua minggu bagi pengunjung dan warga Qatar untuk meninggalkan negara mereka. Kementerian Luar Negeri Bahrain dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa semua diplomat Qatar di Bahrain harus meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam. (Wadrianto, 2017)

Negara Arab Saudi dan UEA memberitahu pelabuhan dan agen perkapalan untuk tidak menerima kapal Qatar milik perusahaan atau perorangan Qatar. Negara Arab Saudi menutup perbatasan dengan Qatar, Iran mengirim kargo makanan ke Qatar dan Arab Saudi membatasi wilayah udaranya bagi Qatar Airways. Sebagai gantinya, Negara Qatar telah mengalihkan penerbangannya ke Afrika dan Eropa melalui Iran. Bank sentral Arab Saudi mendesak perbankan untuk tidak bertransaksi dengan bank Qatar dan riyal Qatar. Bahkan mengenakan kaos FC Barcelona bisa mengakibatkan pemakainya dikenakan denda atau dipenjara di Arab Saudi, karena klub tersebut disponsori oleh Qatar Airways. Akibat pemutusan hubungan diplomatik ini, kesulitan untuk memasok kebutuhan ke Qatar berkembang dengan cepat. Dua sumber pelaku perdagangan di Timur Tengah mengatakan adanya ribuan truk pembawa makanan yang terjebak di perbatasan Saudi karena tak diperbolehkan melintas memasuki Qatar. Selama ini, sekitar 80% dan hampir 90% kebutuhan makanan Qatar bersumber melalui beberapa negara tetangga di Teluk Arab. Sumber perdagangan mengatakan kemungkinan bakal terjadi kekurangan makanan di Qatar hingga krisis hubungan diplomatik mereda. Apabila Qatar mengalami kekurangan

bahan makanan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir berpotensi mengalami aksi pembalasan. Ketiga negara itu rentan terhadap pembalasan, karena selama ini sangat bergantung pada Qatar untuk mendapat pasokan gas alam cair. (Priyambodo, 2017)

Dampak dari krisis di Timur Tengah ini terus meluas, dalam bidang kemanusiaan, banyak warga keturunan Qatar yang tinggal di luar Qatar mengalami kebingungan perihal yang harus diperbuat. Munculnya ultimatum untuk mengusir warga Qatar dalam waktu 14 hari justru menimbulkan krisis kemanusiaan tersendiri. Saat ini, banyak warga negara Qatar yang menikah dengan warga negara dari negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatik. Dalam bidang keamanan, dampak dari Krisis Teluk akibat Negara Qatar ini, disebut oleh Menteri Luar Negeri Jerman, dapat memicu perang. Terlibatnya negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Turki, Prancis, Iran, dan beberapa negara lain membuat persoalan menjadi semakin runyam. Sebagai contoh, tindakan Negara Iran yang mengirimkan kapal perang ke Oman yang kemungkinan meningkatkan ketegangan. (Haryanto, Blokade Qatar, 2017)

Dengan terjadinya peristiwa ini juga mengakibatkan pasar saham merosot, kenaikan harga minyak mentah, penutupan perbatasan, penghentian rute penerbangan multinasional, terjadinya kepanikan masyarakat melakukan pembelian komoditas supermarket. Kemudian negara kepulauan di Asia Selatan Maladewa, negara kepulauan Afrika Timur Mauritius dan negara Afrika Barat Senegal bergabung dengan badai pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Yordania, yang biasa melakukan politik penyeimbang diplomatik, mengumumkan akan mengurangi tingkat representasi diplomatiknya di Qatar, dan juga akan mencabut izin operasi TV Al Jazeera di Yordania. (Macaron, 2017, hal. 59-60)

Arab Saudi adalah negara yang mengambil tindakan paling keras dalam konflik ini. Dengan menghentikan semua penerbangan-penerbangan sipil menuju Qatar, dan menerapkan blokade angkatan laut dan darat, melarang semua mobil dan kapal di Arab Saudi membawa penumpang atau kargo ke Qatar.

Tak hanya itu, Arab Saudi juga adalah satu-satunya negara yang berbatasan darat dengan Qatar. Sebelum ini, sebagian besar makanan Qatar dan produk ternak dan pertanian diangkut melalui Arab Saudi ke Qatar. Setelah Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka menutup perbatasan dengan Qatar, Qatar menjadi sangat terisolasi.

Terkait dengan Pemutusan hubungan diplomatik dan blokade yang dilakukan Arab Saudi pada tanggal lima Juni 2017 terhadap Qatar, dalam waktu lebih dari dua minggu setelah kejadian tersebut kemudian Arab Saudi memberikan sejumlah tuntutan terhadap Qatar. Tuntutan tersebut dihasilkan dari mediasi yang dilakukan oleh Kuwait dan Amerika Serikat. beberapa tuntutan tersebut diantaranya adalah: (DW- Breaking World News, 2017)

1. Mengurangi hubungan diplomatik Qatar terhadap Iran yang di fokuskan dalam tiga hal, yakni menutup misi diplomatik Iran di Doha, Qatar; mengusir anggota pengawal Revolusi Iran dan memotong kerja sama militer, serta intelijen dengan Teheran; memastikan jika hubungan Qatar terhadap Iran mematuhi sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Internasional tanpa membahayakan negara-negara yang berada di kawasan Teluk.
2. Menutup pangkalan militer Turki yang berada di Qatar dan menghentikan segala bentuk kerja sama pertahanan antara Qatar dan Turki, yang mana sebelum terjadinya peristiwa pemutusan hubungan diplomatik ini Turki menambah jumlah pasukan di Qatar dan menawarkan program pendidikan militer di Qatar. Dalam tuntutan ini juga menggambarkan bahwa hubungan Arab memiliki ketidakharmonisan terhadap Turki. Hal ini dibenarkan dengan ditolaknya beberapa undangan Erdogan yang diberikan ke raja Salman untuk mengunjungi Ankara, Turki.
3. Menghentikan dukungan dan memutuskan hubungan dengan seluruh organisasi teroris terutama Ikhwanul

Muslimin, Al-Qaida, Islamic State dan Hizbullah di Lebanon.

4. Memutuskan hubungan dan pendanaan Qatar terhadap organisasi Teroris baik dalam bentuk kelompok ataupun individu yang diperangi oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.
5. Menyerahkan anggota yang di anggap teroris oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain yang menetap di Qatar ke negara asalnya dan membekukan seluruh aset mereka, serta memberikan informasi terkait dengan tempat tinggal, keuangan juga kegiatan yang mereka lakukan.
6. Tidak lagi melakukan campur tangan terhadap urusan negara-negara yang berdaulat dan tidak memberikan lagi kewarganegaraan terhadap buronan yang berasal dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain, serta mencabut kewarganegaraan asing yang dilarang memiliki kewarganegaraan ganda oleh negara asalnya.
7. Menutup stasiun televisi Al Jazeera dan media lainnya yang di biyai oleh pemerintah Qatar, seperti Arabia21, Rassd, Al-araby Al-jadid dan midle east eye.
8. Menyesuaikan kebijakan Qatar baik dalam segi politik, militer, sosial dan ekonomi terhadap negara-negara Teluk dan negara-negara Arab lainnya, serta menaati kerja sama ekonomi yang dibuat dengan Arab Saudi pada tahun 2014.
9. Menghentikan segala bentuk dukungan Qatar terhadap adapun yang dianggap berseberang oleh Arab Saudi, Uni Emirat, Bahrain dan Mesir. Kemudian menyerahkan informasi secara detail, baik itu dalam bentuk dukungan ataupun kerja sama Qatar dengan oposisi tersebut.
10. Membayar reparasi dan kompensasi yang diakibatkan dari jatuhnya korban jiwa atas kebijakan politik Qatar. Dimana nantinya jumlah ganti rugi tersebut akan dibicarakan dengan pemerintah Qatar.

11. Menyetujui seluruh tuntutan Arab Saudi terhadap Qatar dalam waktu sepuluh hari. Apabila Qatar tidak menyetujuinya maka tuntutan ini akan di cabut dan normalisasi digagalkan.
12. Menyetujui adanya audit bulanan wajib selama satu tahun pertama yang akan diberlakukan setelah tuntutan ini disetujui. Kemudian akan ada audit per triwulan di tahun kedua dan selanjutnya Qatar akan diawasi oleh Arab Saudi setiap tahunnya dalam waktu sepuluh tahun ke depan.

Mengenai tuntutan Arab Saudi dan koalisinya tersebut, Qatar justru menolak dan menginginkan jika Arab Saudi segera mengakhiri pemblokiran yang dilakukan oleh Arab Saudi dan sekutunya karena hal tersebut dianggap tidak rasional. Selain itu, Qatar juga menyatakan jika tuntutan tersebut merupakan bentuk intervensi Arab Saudi terhadap negaranya. (Firmansyah, 2017)

C. Dampak Krisis Qatar Bagi Indonesia

Kondisi Qatar yang mendapatkan dampak dari adanya keputusan hubungan diplomatik tersebut juga mencekam kekhawatiran Indonesia yang memiliki banyak kerjasama dengan Qatar. Hal ini dikarenakan asumsi bahwa adanya dampak yang besar terhadap Qatar juga bisa berpengaruh terhadap Indonesia. Terlepas baik dan buruknya, Indonesia merasakan dampak yang signifikan di bidang politik, ekonomi, pendidikan dan keagamaan.

1. Bidang Politik

Sebelum adanya krisis diplomatik Qatar, Indonesia sering melakukan kunjungan dengan pemerintah Qatar dan begitu pun sebaliknya. Mengingat Indonesia memiliki hubungan baik dengan hampir semua negara yang ada di kawasan Teluk, Indonesia harus bersikap netral dan mengambil langkah-langkah yang solutif dalam menyelesaikan krisis diplomatik ini. Dengan adanya krisis ini, Indonesia dan Qatar lebih banyak melakukan kunjungan dan pertemuan dalam rangka untuk membahas permasalahan atau krisis yang sedang terjadi. Dan ini berdampak positif bagi Indonesia untuk bisa

lebih meningkatkan lagi hubungan diplomatik kedua Negara. Adapun kunjungan-kunjungan tersebut dilakukan oleh diantaranya adalah kunjungan perdana emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani melakukan kunjungan kenegaraan perdananya ke Indonesia pada Oktober 2017 silam. Kunjungan ini sudah direncanakan jauh sebelum terjadinya krisis. Kunjungan tersebut membuktikan dan menandakan bahwa adanya krisis diplomatik yang terjadi di Qatar tidak memberi dampak buruk terhadap hubungan politik yang sudah terjalin lama. Hal ini pun juga diapresiasi oleh Presiden Jokowi, beliau mengatakan bahwa kunjungan tersebut sangat penting dan merupakan kunjungan pertama Emir Al Thani ke Indonesia bertepatan dengan 41 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Qatar. Jokowi juga mengatakan kedua negara telah sepakat untuk segera menindaklanjuti apa yang dibicarakan dalam pertemuan bilateral, yang sudah dilaksanakan pada 2015 silam. (Adi, 2017)

Kunjungan lainnya juga dilakukan oleh delegasi parlemen RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon diterima Menteri Luar Negeri Qatar Soltan bin Saad Al-Muraikhi di Doha pada Januari 2018 silam. Pertemuan di gedung Kementerian Luar Negeri Qatar tersebut dihadiri juga oleh anggota delegasi Indonesia, yaitu Biem Benjamin (Fraksi Gerindra), Kartika Yudhisti (Fraksi PPP), OO Sutisna (Fraksi Gerindra), dan didampingi Duta Besar Indonesia untuk Qatar Basir Sidehabi. Pertemuan itu digelar atas undangan Ketua Majelis Syuro (Parlemen) Qatar.

Kunjungan delegasi parlemen RI ke Qatar menegaskan sikap independen Indonesia dalam memandang krisis yang dialami Qatar. Kunjungan itu juga menempatkan kedua negara dalam posisi yang lebih dekat untuk bekerja sama menangani berbagai isu kawasan dan internasional. Dalam kunjungan tersebut, Fadly Zon menyampaikan keprihatinan Indonesia atas blokade Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir yang diberlakukan terhadap Qatar. Menurut beliau, blokade tersebut sangat disayangkan. Sebab menurutnya tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menerapkan blokade terhadap Qatar. Dalam

hal ini, sesuai konstitusi Indonesia, delegasi Indonesia tersebut melihat blokade terhadap Qatar hanya akan memunculkan potensi konflik yang lebih besar yang justru akan merugikan semua pihak terkait. Dan pada pertemuan itu juga Fadly Zon mendukung dan memberikan apresiasi terhadap sikap Qatar yang tidak terprovokasi walaupun sedang dalam kondisi diblokade oleh negara-negara teluk lainnya. Sehingga, masyarakat Qatar cenderung tetap stabil dan semakin solid dan kuat. (Shamil, 2018)

2. Bidang Ekonomi

Krisis politik yang terjadi di Qatar menyebabkan sejumlah bisnis di negara itu merasa khawatir, hal ini dikarenakan sejumlah sektor bisnis di Qatar diprediksikan akan mengalami dampak buruk akibat pemutusan hubungan diplomatik oleh empat negara Teluk. Sejumlah sektor tersebut antara lain: perbankan, pangan, transportasi, konstruksi dan media. Krisis geopolitik besar kemungkinan memicu krisis ekonomi dan keuangan.

Managing Director dan Kepala Riset Ekuitas Arqaam Capital, Jaap Meijer pun mengatakan bahwa dampak nyata yang terjadi kini adalah harga barang di Qatar kian mahal dan Kemudian berlanjut pada pertumbuhan ekonomi. Perbankan menjadi sektor yang menerima tekanan paling berat karena krisis ini. Sebab perbankan domestik Qatar sangat bergantung dengan aliran dana asing. Selama ini, deposito-deposito non residen nasabah bank di Qatar seperti Qatar National Bank, Bank QPSC dan Commercial Bank QSC menyumbang kontribusi sebanyak 24% terhadap simpanan deposito di negara tersebut. Adanya blokade-blokade tersebut dapat memberikan dampak juga kepada Indonesia, mengingat banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh kedua Negara. (Rafie, 2017)

Sejak 5 juni 2017, indeks saham Qatar memerah. Pada 4 Juni 2017, Indeks QE ditutup di angka 9.923,6. Pada tanggal 5 Juni pukul 16.32 WIB, Indeks QE anjlok ke angka 9.151. Saham di semua sektor industri menurun drastis. Sejauh ini, sektor *real estate* tampak paling parah, turun hingga 9,9 persen. Tapi, tak ada sektor yang turun lebih rendah dari lima persen.

Harga saham Ooredoo juga ikut menurun drastis. Tanggal 16 Juni 2017, saham perusahaan telekomunikasi itu ditutup di angka 101,8 riyal Qatar. Pada hari krisis diplomatik Qatar berlangsung, sahamnya ditutup seharga 96 riyal Qatar, dan turun ke angka 6 persen. Sampai pada tanggal 17 Juni 2017, saham Ooredoo belum bisa bangkit lagi ke angka 100. Faktanya, negara-negara yang memboikot Qatar bukanlah konsumen besar Ooredoo, namun pelanggan terbesar Ooredoo ada di Indonesia, porsinya sekitar 64,1 persen. Porsi pelanggan terbesar kedua ada di Algeria, yakni sebesar 9,3 persen. Selisih angkanya jauh sekali dengan Indonesia.

Ooredoo adalah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi asal Qatar. Selain di negara asalnya, ia beroperasi di sejumlah negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Di Indonesia, Ooredoo adalah pemegang saham mayoritas PT Indosat Tbk sejak 2015, yakni sebesar 65 persen. Kepemilikan saham Indosat ini melalui Ooredoo Asia Pte, dan Qatar Holding LLC memiliki saham 51,7 persen di Ooredoo Asia. Indosat tampak ikut terkena dampak dari kabar buruk yang menimpa pemegang sahamnya. Pada Senin, 5 Juni lalu, ketika negara-negara Arab memutuskan hubungan dengan Qatar, saham Indosat masih baik-baik saja, bahkan naik dari hari sebelumnya. Akan tetapi, keesokan harinya, harga saham emiten berkode ISAT itu turun dari Rp6.675 ke Rp6.500. Hari-hari berikutnya, saham ISAT terus turun. Tanggal 7 Juni 2017 adalah titik terendahnya, ia ditutup dengan harga Rp6.100. Sampai 17 Juni 2017 pun, harga saham Indosat masih berada di angka Rp6.275. (Zuhra, Nasib Bisnis Ooredoo Setelah Qatar Diboikot, 2017)

Pemutusan hubungan diplomatik ini pun langsung membuat harga minyak mentah dunia melonjak. Harga minyak dunia sempat melorot ke angka \$46,5 per barel. Sehari setelah pemutusan hubungan diplomasi diumumkan, harga minyak naik ke angka lebih dari \$48,3 per barel. Ekonom Indef, Bhima Yudhistira memprediksi harga minyak akan terus naik jika konflik ini terus berkepanjangan. Menurut Bhima, kalau harga minyak tidak naik ke harga \$50 per barel, defisit keuangan Arab

Saudi akan makin parah Sangat jelas bahwa Qatar akan menjadi negara yang paling dirugikan dari putusnya hubungan diplomatik ini. Merespons kabar pemutusan hubungan diplomatik tersebut harga minyak sempat turun lebih dari 1 persen. Timbulnya peningkatan kekhawatiran bahwa pemutusan hubungan diplomasi empat negara Arab dengan Qatar bisa menghambat upaya untuk mengurangi produksi minyak. David menilai, pengaruh keputusan tersebut tidak akan memberikan dampak terlalu signifikan terhadap harga minyak dunia karena suplai minyak saat ini masih terkontrol sehingga suplai dunia masih melimpah sesuai kesepakatan negara-negara OPEC dan suplai dari Amerika Serikat. (Sari, 2017) Namun, kekhawatiran akan melemahnya harga minyak dunia diperkirakan akan terjadi jika masalah krisis diplomatik Qatar terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian. Kemudian akan berdampak pada kondisi minyak dunia termasuk Indonesia yang juga akan ikut merasakan dampak akibat adanya krisis minyak dunia ini. Menurut pengamat minyak yang juga anggota komisi energi DPR, Kurtubi, jika harga minyak turun, investasi eksplorasi eksploitasi minyak di Indonesia akan melemah. Namun, sebagai negara pengimpor minyak yang cukup besar, Indonesia sebenarnya diuntungkan dengan kembali melemahnya harga minyak mentah. Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan peluang di saat harga minyak sedang anjlok ini. Hal ini mengingat Indonesia masih mengimpor minyak cukup besar guna menutup kebutuhan dalam negeri. Dari total kebutuhan konsumsi minyak sebesar 1,6 juta bph, Indonesia hanya memproduksi sekitar 800 ribu bph di dalam negeri. Selisih kebutuhan minyak ini harus ditutup dengan impor. Dengan harga minyak yang lebih murah, harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri kemungkinan tidak akan naik. (BBC News, 2018)

Transaksi perdagangan Indonesia dan Qatar juga tidak besar. Pada kuartal pertama 2017, nilai ekspor Indonesia ke Qatar hanya mencapai US\$ 15,39 juta, dan nilai impor dari Negara Teluk itu sebesar US\$ 164,91 juta. Indonesia memang

menerima kiriman gas minyak cair (*liquefied petroleum gas/LPG*) dari Qatar, yang pada 2016 mencapai 1,5 juta ton. Namun, Indonesia tidak membeli langsung dari Qatar. Di luar krisis diplomatik Negara-negara Teluk itu, investor lebih mencermati sejumlah isu global yang akan berpengaruh pada volatilitas pasar. (Asmara, 2018)

Hal ini berbeda dengan perusahaan penerbangan Qatar Airways, beberapa analisis memperkirakan ketegangan politik antara Qatar dan negara-negara lain di Arab akan menimbulkan dampak buruk bagi maskapai itu. Pekan lalu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memblokir penerbangan Qatar Airways. Qatar Airways juga menghentikan penerbangannya ke empat negara Arab itu, sebagai tanggapan terhadap penghentian penerbangan Etihad milik Uni Emirat Arab; Emirats, FlyDubai dan EgyptAir milik Mesir; dan Gulf Air milik Bahrain – ke Qatar. Bandara Internasional Hamad yang baru di Doha melayani jalur transit utama bagi sekitar 37 juta penumpang setiap tahun, umumnya antara Eropa dan Asia. Pembatalan penerbangan itu menimbulkan dampak bagi banyak pengguna pesawat terbang yang terbang ke Doha sebelum melanjutkan ke tujuan lain. Qatar Airways kini menggunakan rute yang lebih panjang untuk menuju ke Eropa dan Amerika Utara, termasuk penerbangan langsung ke bandara tersibuk di dunia yaitu di Atlanta. CEO Qatar Airways Akbar Al-Baker mengakui langkah-langkah itu dalam pernyataan laporan keuangan tahunan perusahaan itu. Qatar Airways tetap beroperasi di seluruh jaringan lain sebagaimana jadwal yang dipublikasikan, dengan penyesuaian operasi dan efisiensi komersial dari hari ke hari. (VOA , 2017)

Dalam hal ini tentu akan berdampak pada penerbangan oleh jamaah umroh dan haji dari Indonesia yang akan menuju ke Arab Saudi. Dan dampaknya secara signifikan akan berpengaruh terhadap WNI yang berada di Qatar. Pasalnya warga negara Indonesia yang berada di Qatar, khawatir akan kesulitan mudik pada lebaran tahun 2017 silam. Hal tersebut membuktikan bahwa Konsekuensi krisis diplomatik antara

Qatar dan sejumlah negara Teluk tak hanya berimbas pada kegiatan penduduk setempat, tapi juga mobilitas warga Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar Muhammad Basri Sidehabi mengatakan mobilitas WNI terkena dampak karena akses perhubungan ditutup oleh sejumlah negara Teluk yang memutuskan hubungan dengan Qatar. Ia mengatakan bahwa Mobilitas warga di Qatar akan sedikit banyak terdampak, antara lain karena maskapai Persatuan Emirat Arab mengumumkan akan menghentikan layanan ke Qatar, serta Qatar Airways telah menghentikan layanan penerbangan ke Saudi Arabia dan Persatuan Emirat Arab. (Samosir, 2017)

Mengingat banyaknya tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Qatar juga dikhawatirkan akan terganggu aktivitasnya setelah terjadi konflik ini. Banyaknya blokade yang terjadi di Qatar mengakibatkan ketakutan dan kekhawatiran terhadap tenaga kerja Indonesia yang berada di Qatar. Mengenai posisi Indonesia dan Krisis Timur Tengah semakin nyata terlihat ketika krisis diplomatik memblokade Qatar oleh negara-negara Teluk. Presiden RI dan Menlu RI lebih lantang bicara soal solusi peredaan krisis diplomatik Qatar dan menawarkan diri menjadi pendamai, sementara kepastian dari keselamatan warganya yang bekerja dalam situasi blokade ekonomi di kawasan ini jarang mendapatkan kabar dan berita dari doha. Faktanya ada sekitar 45.000 buruh migran Indonesia (data resmi pemerintah, jumlah nyatanya kemungkinan besar lebih banyak) bekerja di kawasan ini dan tak lama setelah pemutusan hubungan diplomatik sepihak dilakukan terhadap Qatar, dilancarkanlah blokade ekonomi dan moda transportasi yang mempengaruhi pasokan logistik dan mobilitas orang-orang yang berada di Qatar. Bahkan dalam kondisi damai pun, kondisi buruh migran Indonesia di kawasan Timur Tengah ini berada dalam situasi kerentanan dan terisolasi. Kerentanan itu dicerminkan dalam tingginya angka kekerasan dan perkosaan yang dialami PRT migran, masih terus berlangsungnya eksekusi mati dan pemidanaan hukuman mati terhadap buruh migran dan masih berlakunya sistem

keimigrasian kaffala (kaffala system) yang menyerupai praktik perbudakan manusia. (Susilo, 2017)

3. Bidang Pendidikan Dan Keagamaan

Adanya krisis diplomatik yang terjadi di Qatar sangat diharapkan untuk tidak mengurangi kerjasama di bidang pendidikan khususnya di bidang keagamaan dari Indonesia dan Qatar. Karena kerjasama antara Qatar dan Indonesia sudah berjalan dengan baik. Selama ini, Qatar Foundation dan Qatar Carity sudah banyak memberi bantuan di Indonesia, mulai dari bidang keagamaan sampai bidang pengembangan pendidikan. Harapan Indonesia untuk terus meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan dan keagamaan ini dapat wujudkan walaupun Qatar sedang dilanda krisis diplomatik Qatar. Hal ini pun dibuktikan dengan adanya sejumlah program kerja sama pemberdayaan ekonomi di Aceh, yang sudah dibahas oleh Kemedang Provinsi Aceh dengan Qatar Charity Indonesia. Pada september 2017. Adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh. Bantuan keagamaan dan pendidikan terus diberikan Qatar Charity kepada Indonesia, seperti bantuan pembangunan masjid di komplek Yayasan Izzatul Islam Getasan yang beralamat di Dusun Pongangan, Desa Samirono, Kec. Getasan pada Februari 2018. Perwakilan Qatar Charity Indonesia, Hamid Noor Yasin sebelum meletakkan batu pertama pembangunan masjid mengatakan bahwa ia berharap masjid yang akan dibangun ini bisa memberikan manfaat kepada penerima manfaat yaitu keluarga besar Izzatul Islam Getasan. Sehingga ke depan akan lahir generasi yang sholih dan penghafal Al-Qur'an. (Admin Jaringan Sekolah Islam terpadu Indonesia, 2018)

Selain itu, pada september 2018, Wali Kota Banda Aceh, H Aminullah Usman SE Ak MM melakukan pertemuan dengan dubes Qatar untuk Indonesia, Ahmed Bin Yassin Al-Hamar di pendopo Wali Kota. Ahmed Bin Yassin Al-Hamar mendatangi pendopo Wali Kota usai melakukan peletakan batu pertama 15 unit rumah dhuafa di Deah Raya dan Alue Naga. Dihadiri bersama Dubes, Direktur Qatar Charity Indonesia, Karam Zeinhom, Direktur Qatar Charity Indonesia Cabang

Aceh, Muhammad Idhar Syah. Sementara, Wali Kota ikut didampingi Wakil Wali Kota, Drs H Zainal Arifin, Ketua DPRK, Arif Fadillah, Kepala Dinas Perkim, Ir Jalaluddin MT, Kabang Hukum Setdakota, Azmi SH, Kabag Adm Ekonomi, M Ridha S STP dan Kabag Umum, Wahyudi S STP. Pemerintah Qatar dan Pemko Banda Aceh membahas kemungkinan memperluas kerjasama. Selama ini kerjasama telah terjalin pada program program kemanusiaan, terutama pasca musibah gempa dan tsunami melanda Aceh. Sementara pada bulan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, H M Daud Pakeh mengungkapkan, pembangunan perekonomian di Aceh harus diimbangi dengan produktifitas SDM dan SDA. Karenanya, dengan adanya bantuan dari *Qatar Charity* diharapkan bisa menunjang SDM dan SDA tersebut. Secara sumber daya manusia (SDM), Kakanwil mengharapkan selain dibantu peralatan dan alat kerja lainnya, juga terus dilatih dan dibekali menurut keahliannya masing masing melalui berbagai pelatihan atau *workshop* termasuk membekali mereka dengan ilmu mengelola keuangan. Sehingga ke depan masyarakat lebih produktif dan mandiri. (Pemerintah Aceh, 2018)

Qatar Charity merupakan mitra Kementerian Agama yang telah menjalin kerjasama sejak tahun 2004 melalui penandatanganan *MoU* Kementerian Agama melalui Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri dengan *Qatar Charity*. Menurut kakanwil, program dan kegiatan *Qatar Charity* di Aceh berbeda dengan lembaga sosial luar negeri lainnya, sejak pasca tsunami hingga saat ini Qatar tetap fokus bekerja untuk pembinaan dan mengasuh anak-anak yatim korban tsunami yang sebagian mereka adalah siswa Madrasah, sejak mereka masuk usia sekolah hingga perguruan tinggi dengan program anak asuh dan beasiswa secara berkelanjutan. Program bantuan dalam bidang pendidikan dan keagamaan dari Qatar Charity ini tentu diharapkan dapat terus ditingkatkan tanpa terjadi hambatan yang kemungkinan diakibatkan oleh adanya krisis diplomatik Qatar. (Ikhsan, 2018)

Dalam hal ini, ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menilai jika tidak terdapat solusi atas penyelesaian dalam kasus ini akan dikhawatirkan adanya perseteruan lanjutan yang bahkan bisa berdampak pada perang saudara antar sesama umat Islam. Hal ini bisa berdampak buruk bagi Indonesia yang memiliki banyak kerjasama di bidang keagamaan dengan negara-negara Teluk khususnya dengan negara-negara yang bersengketa.